



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG



LAPORAN KEUANGAN

**SEMESTER I TAHUN 2025
BAGIAN ANGGARAN 005.01.403429**

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**



**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PANGKALPINANG**

LAPORAN KEUANGAN

Semester I 2025

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

**JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran
Pemprov Bangka Belitung**

**Kota Pangkalpinang
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Telp. 0717-9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG 403429

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.05

**DIRJEN BADAN PERADILAN MILITER DAN TATA USAHA NEGARA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Provinsi Bangka Belitung

Telp. 0717-9111513 PANGKALPINANG - Babel 403429

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2025
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dora Natalia Singarimbun, S.E., M.M.
NIP. 198112292006042015

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab.....	iii
Ringkasan.....	01
I. Laporan Realisasi Anggaran.....	04
II. Neraca.....	05
III. Laporan Operasional.....	06
IV. Laporan Perubahan Ekuitas.....	07
V. Laporan Kinerja.....	08
VI. Catatan atas Laporan Keuangan.....	09
A. Penjelasan Umum.....	09
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang.....	09
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
A.3. Basis Akuntansi.....	10
A.4. Dasar Pengukuran.....	11
A.5. Kebijakan Akuntansi.....	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	20
B.1. Pendapatan.....	21
B.2. Belanja.....	22
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	24
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.....	24
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan.....	24
C.3. Persediaan.....	24
C.4. Peralatan dan Mesin.....	25
C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	25
C.6. Uang Muka dari KPPN.....	25
C.7. Ekuitas.....	26

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	26
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	26
D.2.	Beban Pegawai.....	27
D.3.	Beban Persediaan.....	27
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	28
D.5.	Beban Pemeliharaan.....	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	29
D.7.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.8.	Kegiatan Non Operasional.....	30
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	31
E.1.	Ekuitas Awal.....	31
E.2.	Surplus (defisit) LO.....	31
E.3.	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	31
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	31
E.4.1.	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagikan ke Entitas Lain (DKEL).....	32
E.4.2.	Transfer Masuk.....	32
E.5.	Ekuitas Akhir.....	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya.....	33
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca.....	33
F.2.	Pengungkapan Lain-lain.....	33
F.2.1.	Temuan dan Tindaklanjut Temuan BPK.....	33
F.2.2.	Informasi Pendaptan dan Belanja secara Akrua.....	33
F.2.3.	Rekening Pemerintah.....	33
F.2.4.	Revisi DIPA.....	34
F.2.5.	Ralat SPM, SSBP,SSPB.....	34
F.2.6.	Catatan Penting Lainnya.....	34
Lampiran-lampiran		

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

JL. Pulau Bangka Komplek Perkantoran Prov. BABEL. Pangkalpinang - BABEL Telp. 0717-
9111513

e-mail : info@ptun-pangkalpinang.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Tahun 2025 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2025

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris,



Dora Natalia Singarimbun
NIP. 198112292006042015

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan instansi, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Semester I 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2025 s.d. 30 Juni 2025 .

Realisasi Pendapatan Negara Semester I 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 3.858.500 ,- dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 5.251.000 ,-

Realisasi Belanja Negara pada Semester I 2025 adalah sebesar Rp 15.200.000,- atau mencapai 28,47% dari alokasi anggaran sebesar Rp 53.385.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2025 .

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 sebagaimana telah diubah dengan 213/PMK.05/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011, Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 163.123 ,- yang merupakan aset lancar yang terdiri dari : Kas di Bendahara Pengeluaran Rp. 800.000,- Kas Lainnya dan Setara Kas Rp. 4.600.420,- Persediaan sebesar Rp 8.723.123,-

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp 13.960.420 ,- yang terdiri dari Utang pihak ketiga Rp. 13.160.420,- Uang muka dari KPPN Rp. 800.000

Nilai Ekuitas disajikan sebesar Rp. 163.123,-. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp. 14.123.543

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan -LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 3.858.500 ,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 23.760.000,- sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 19.901.500,-). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus(DEFISIT) sebesar (Rp. 19.901.500,-),- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar(Rp. 19.901.500,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp. 7.573.123,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 19.901.500,-). kemudian ditambah dengan Selisih Revaluasi Aset Tetap senilai Rp. 0,- ditambah Koreksi Lain-Lain senilai Rp.0,- ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.491.500,- dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas (Rp. 7.410.000) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2025 adalah senilai Rp. 163.123,-

5. LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA

Laporan Kinerja Satuan Kerja adalah laporan yang berisi informasi mengenai pencapaian dan kinerja suatu satuan kerja atau unit organisasi dalam periode waktu tertentu. Laporan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana satuan kerja tersebut telah memenuhi target, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengungkapan laporan kinerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang disajikan untuk melihat hasil kinerja selama tahun anggaran 2025.

6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode per 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

NO	Uraian	Catatan	TA 2025		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	A.1			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	A.1.1	5.251.000	3.858.500	73,48
	Hibah	A.1.2	0	0	0
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		5.251.000	3.858.500	73,48
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	0	0	00
2.	Belanja Barang	B.2.2.	53.385.000	15.200.000	28,47
3.	Belanja Modal	B.2.3.	0	0	00
	Jumlah Belanja Negara		53.385.000	15.200.000	28,47

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
NERACA
PER 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN		Catatan		2025	2024
ASET					
Aset Lancar		C.1			
Kas dan Bank					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	1.	800.000	0	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.	2.	4.600.420	0	
Persediaan	C.1.	3.	8.723.123	7.573.123	
Jumlah Aset Lancar			14.123.543	7.573.123	
Aset Tetap		C.2			
Tanah	C.2.	1.	0	0	
Peralatan dan Mesin	C.2.	2.	0	0	
Gedung dan Bangunan	C.2.	3.	0	0	
Aset Tetap Lainnya	C.2.	4.	0	0	
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.	5.	0	(0)	
Jumlah Aset Tetap			0	0	
Aset Lainnya		C.4			
Aset tak Berwujud	C.4.	1.	0	0	
Aset Lain-lain	C.4	2.	0	0	
Akumulasi Penyusutan / Amortisasi Aset	C.4	3.	(0)	(0)	
Jumlah Aset Lainnya			0	0	
Jumlah Aset			163.123	7.573.123	
KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek		C.5			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.5.	1.	13.160.420	0	
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.5.	2.	0		
Uang Muka dari KPPN	C.5	3.	800.000	0	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			13.960.420	0	
Jumlah Kewajiban			13.960.420	0	
EKUITAS					
Ekuitas		C.6			
Jumlah Ekuitas			163.123	7.573.123	
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas			14.123.543	7.573.123	

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.858.500	2.613.500
Jumlah Pendapatan		3.858.500	2.613.500
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	0	0
Beban Persediaan	D. 3	0	0
Beban Barang dan Jasa	D. 4	15.200.000	15.154.000
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	8.560.000	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 7	0	0
Jumlah Beban		23.760.000	15.154.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(19.901.500)	(12.540.500)
Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 11	0	0
Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya	D. 12	0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(19.901.500)	(12.540.500)
Pos Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(19.901.500)	(12.540.500)

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN TATA USAHA PANGKALPINANG
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 Juni 2025
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
Ekuitas Awal	E. 1	7.573.123	1.448.500
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(19.901.500)	(12.540.500)
Ekuitas	E. 3		
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Selisih Revaluasi Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.3	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.4	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	12.491.500	12.386.500
Kenaikan/penurunan ekuitas		(7.410.000)	(154.000)
Ekuitas Akhir		163.123	1.294.500

*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

V.

LAPORAN KINERJA

V. Laporan Kinerja

LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung
Unit Organisasi : Direktorat Jendral Badimiltun
Satuan Kerja : Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang
Fungsi : Ketertiban dan Keamanan
Sub Fungsi : Peradilan
Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Lokasi : Kep. Bangka Belitung

Kode	Kegiatan	Belanja			Output				Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan Kegiatan	%	
005.05.BF.1059.AEA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Koordinasi	2,480,000	2,000,000	80,65	1	0		81	
005.05.BF.1059.BCA.001	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Perkara Hukum Perseorangan	405,000	0	0	1	0	Perkara	31	
005.05.BF.1059.QBA.001	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,000,000	12.900,000	30,09	96	49	Orang	49	
005.05.BF.1059.QCA.002	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara/ Perkara Hukum Perseorangan	17,500,000	300.000	1,71	1	1	Perkara	100	
	Sub Total	53.385.000							
	Penyesuaian	0							
	Total	53.385.000							

Catatan : Untuk kegiatan sidang keliling sudah dilaksanakan seperti terlihat pada output yang telah mencapai 100%, akan tetapi untuk realisasi pertanggung jawaban akan dilaksanakan di bulan Juli, agar tidak mengganggu RPD yang telah ditetapkan

VI

*CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

VI. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang didirikan sebagai salah satu upaya untuk memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terletak di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Terpadu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pangkalpinang.

Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan Aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu Rangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) Aplikasi SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Modul Aset Tetap SAKTI adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi

apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan

hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur denganandal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat di neraca berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Aset tetap dilaporkan pada neraca berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (*satu juta rupiah*);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementrian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 30 Juni 2025. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga

yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan, Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2020. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survey lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek selain Tanah.

- Nilai asset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai asset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun apabila nilai asset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Asset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang semakin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Asset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 1. Tanah
 2. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel Masa Manfaat

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Anggaran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya. KM.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Semester I 2025	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka

panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah mengadakan 3 (tiga) kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal yaitu :

1. Revisi I tanggal 21 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
2. Revisi II tanggal 20 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. Revisi III tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	5.251.000	5.251.000
Jumlah Pendapatan	5.251.000	5.251.000
Belanja		
Belanja Pegawai	0	0
Belanja Barang	53.385.000	53.385.000
Belanja Modal	0	0
Jumlah Belanja	53.385.000	53.385.000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan Rp.
3.858.500

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir dari pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 3.858.500,-. Pendapatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi
PNBP

No.	Uraian	2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	470.000	360,000	76,6
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1,420,000	1,100,000	78,01
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	4,932,000	2.398.500	71.15
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.251.000	3.858.500	73,48

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara :
Rp. 15.200.000

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp. 15.200.000 atau sebesar 28,47.07 % dari anggaran senilai Rp. 53.385.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni TA 2025 adalah sebagai berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025

Uraian	2025		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	53.385.000	15.200.000	28,47
Belanja Modal	0	0	0
Total Belanja Bruto	53.385.000	15.200.000	28,47
Pengembalian Belanja	0	0	0
Total Belanja Netto	53.385.000	15.200.000	28,47

Dibandingkan dengan realisasi 30 Juni TA 2024 senilai Rp 36,172,000 dari total Pagu Rp 36,175,000,- atau senilai 99.99 %, Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2025 mengalami penurunan penyerapan anggaran belanja barang yaitu sebesar 2,92%.

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai : Rp. 0

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja
Barang :
Rp.15.200.000

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Per 30 Juni TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 15.200.000 dan Rp.36,172,000. Ada peningkatan anggaran jika dibandingkan dengan TA yang lalu. Namun untuk persentase penyerapan mengalami penurunan dikarenakan ada belanja yang tidak dapat dicairkan karena tidak adanya kegiatan sidang keliling dan perkara prodeo yang masuk.

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Kas di Bendahara Pengeluaran:
Rp. 0 ,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 0,- kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Brankas	0
Uang di Bank	0
Kuitansi yang belum di SPM GUKan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

Kas di Bendahara Penerimaan :
Rp. 0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Uang Tunai di Rekening RPL	0
Kuitansi yang belum di SPM Gukan	0
Selisih Pembulatan	0
Jumlah	0

C.3. Persediaan

Persediaan :
Rp. 163.123

Persediaan per 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp. 163.123,- Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan

untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Jumlah Sesuai dengan berita acara stock opname fisik.

C.4. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp. 0

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 adalah Rp. 0 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap : Rp. (0)

Saldo Awal	0
Mutasi Tambah	0
Reklasifikasi Masuk	0
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Reklasifikasi Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2025	0
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2025	(0)
Nilai Buku per 30 Juni 2025	0

C.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 Rp (0). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Uang Muka dari
KPPN:
Rp.0

C.6. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 0,- . Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.7. Ekuitas

Ekuitas:
Rp.163.123

Ekuitas per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 163.123,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan
PNBP:
Rp.3.858.500

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 Rp. 3.858.500
Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2025

No.	Uraia	2025		
		Estimasi Pendaptan	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan upah pada Panitera Badan Peradilan	470.000	360.000	76.6
2.	Pendapatan Ongkos Perkara	1,410,000	1,100.000	78.01
3.	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	3,371,000	2,398,000	71.15
4.	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	
		5.251.000	3.858.500	73.48

D.2.Beban Pegawai

Beban Pegawai
: Rp. 0

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp.0

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Gaji Pokok PNS	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0
Beban Tunj. Anak PNS	0
Beban Tunj. Struktural PNS	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	0
Beban Tunj. PPh PNS	0
Beban Tunj. Beras PNS	0
Beban Uang Makan PNS	0
Beban Tunjangan Umum PNS	0
Total Beban Pegawai	0

D.3.Beban Persediaan

Beban Persediaan :
Rp. 0

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0,

- Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Persediaan Konsumsi	0
Total Beban Persediaan	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang
dan Jasa :
Rp.15.200.000

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2025 sebesar Rp. 15.200.000. Beban
Barang dan Jasa terdiri dari beban bahan dan beban jasa konsultan.

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0
Beban Bahan	2.900.000
Beban Jasa Konsultan	12.000.000
Beban Jasa Lainnya	300,000
Total Beban Barang dan Jasa	15.200.000

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2025 sebesar Rp. 0.
Rp. 0

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0
Total Beban Pemeliharaan	0

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp. 8.560.000

Beban Perjalanan Dinas untuk TA 2025 sebesar Rp. 8.560.000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Perjalanan Biasa	8.560.000
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting	0
Total Beban Perjalanan Dinas	8.560.000

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.0

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk per 30 Juni TA 2025 sebesar Rp 0

Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni TA 2025

Uraian	TA 2025
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Beban Amortisasi Software	0
Beban Penyusutan asset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	0

D.8. Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional : Rp. 0

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional per 30 Juni 2025

Uraian	TA 2025
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
Beban Kegiatan Non Operasioanl Lainnya	0
Jumlah Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0
Surplus (defisit) Kegiatan Non Operasional	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal : Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 7.573.123,-
Rp. 7.573.123

E.2. Surplus (defisit) LO

Surplus(defisit) LO : (Rp 19.901.500) Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar (Rp.19.901.500). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi: Rp. 0 Koreksi Nilai Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Koreksi Antar Entitas : Rp12.491.500,- Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp.12.491.500,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	15.200.000
Diterima Dari Entitas Lain	(3.858.500)
Transfer Keluar	0
Transfer Masuk	1.150.000
Pengesahan Hibah Langsung	0
Jumlah	12.491.500

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas Negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar Rp. (-3.858.500) sedangkan DKEL sebesar Rp 15.200.000,-

E. 4.2 Transfer Masuk

Transfer Masuk merupakan penerimaan dari entitas pelaporan lain. Pada periode hingga 30 Juni 2025 , nilai transfer masuk sebesar Rp. 1.150.000

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir : Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp. 163.123,-
Rp. 163.123,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK baik di Tahun Anggaran 2025 maupun Tahun Anggaran sebelumnya.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan dijelaskan pada laporan keuangan Semester I 2025 Tahun 2025.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah :

1. BRI Cab. Pangkalpinang A/C 653244019681000 a.n. BPG 015 PTUN PKP yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.
2. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 651554034291000 a.n. BPG 015 PTUN PKP 403429 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILMILTUN dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Pangkalpinang A/C 0063-01-002185-30-7 a.n. RPL 015 PDT PTUN PKP UTK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2025 2025 terdapat 3 (tiga) Revisi DIPA yaitu :

1. Revisi I tanggal 21 Februari 2025 berupa Revisi Hal. III DIPA Terkait Rencana Penarikan Dana Triwulan I (Januari-Maret) dan Revisi Efisiensi Anggaran TA 2025.
2. Revisi II tanggal 20 Maret 2025 berupa Revisi Buka Blokir Efisiensi Anggaran TA 2025.
3. Revisi III tanggal 21 April 2025 tentang Revisi Hal. III DIPA terkait rencana penarikan dana Triwulan II (April-Juni) dan Pemutakhiran POK.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pada periode Laporan Keuangan Semester I 2025 tidak terdapat ralat SPM, SSBP, maupun SSPB.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Prioritas nasional VII - Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transpformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui 2 (dua) rincian output yaitu ;

1. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan TUN
2. Perkara sidang diluar gedung pengadilan di Lingkungan TUN

Lampiran-lampiran

--	--

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 29/07/25 1:08 PM
Tgl Cetak : 29/07/25 3:06 PM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,858,500	2,613,500	1,245,000	47.637
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,858,500	2,613,500	1,245,000	47.637
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,858,500	2,613,500	1,245,000	47.637
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	15,200,000	15,154,000	46,000	0.304
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	8,560,000	0	8,560,000	
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 29/07/25 1:08 PM
Tgl Cetak : 29/07/25 3:06 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	23,760,000	15,154,000	8,606,000	56.79
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,901,500)	(12,540,500)	(7,361,000)	58.698
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,901,500)	(12,540,500)	(7,361,000)	58.698
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,901,500)	(12,540,500)	(7,361,000)	58.698

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)

WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG

SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl Data : 29/07/25 1:08 PM

Tgl Cetak : 29/07/25 3:06 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	800,000	0	800,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	4,600,420	0	4,600,420	0.00
Persediaan	8,723,123	7,573,123	1,150,000	15.19
JUMLAH ASET LANCAR	14,123,543	7,573,123	6,550,420	86.50
JUMLAH ASET	14,123,543	7,573,123	6,550,420	86.50
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	13,160,420	0	13,160,420	0.00
Uang Muka dari KPPN	800,000	0	800,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	13,960,420	0	13,960,420	
JUMLAH KEWAJIBAN	13,960,420	0	13,960,420	
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	163,123	7,573,123	(7,410,000)	(97.85)
JUMLAH EKUITAS	163,123	7,573,123	(7,410,000)	(97.85)
JUMLAH EKUITAS	163,123	7,573,123	(7,410,000)	(97.85)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	14,123,543	7,573,123	6,550,420	86.50

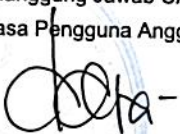
Keterangan :

FINAL

Pangkalpinang, 29 Juli 2025

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



DORA NATALIA SINGARIMBUN

NIP 198112292006042015



TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA: 005
UNIT ORGANISASI : 05
WILAYAH/PROVINSI : 3000
SATUAN KERJA : 403429

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Tgl. Cetak 29/07/2025 3:07 PM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	7,573,123	0
0.0	391111	Ekuitas	0	7,573,123
JUMLAH			7,573,123	7,573,123

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I

: Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05

SATUAN KERJA

: PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM

Tgl Cetak : 04/08/25 12:26 PM

Halaman : 1

lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5,251,000	3,858,500	(1,392,500)	73.48	6,972,000	2,613,500	(4,358,500)	37.49
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	5,251,000	3,858,500	(1,392,500)	73.48	6,972,000	2,613,500	(4,358,500)	37.49
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	5,251,000	3,858,500	(1,392,500)	73.48	6,972,000	2,613,500	(4,358,500)	37.49
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	53,385,000	15,200,000	(38,185,000)	28.47	77,250,000	15,000,000	(62,250,000)	19.42
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	53,385,000	15,200,000	(38,185,000)	28.47	77,250,000	15,000,000	(62,250,000)	19.42
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005

ESELON I : Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 05

SATUAN KERJA : PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG 403429

Tgl Data : 04/08/25 7:26 AM
Tgl Cetak : 04/08/25 12:26 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc



URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	53,385,000	15,200,000	(38,185,000)	28.47	77,250,000	15,000,000	(62,250,000)	19.42
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 4 Agustus 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 05
: 3000
: 403429

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 29/07/25 3:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	470,000	360,000	0	360,000	76.6
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	1,410,000	1,100,000	0	1,100,000	78.01
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	3,371,000	2,398,500	0	2,398,500	71.15
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya					
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	5,251,000	3,858,500	0	3,858,500	73.48
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	5,251,000	3,858,500	0	3,858,500	73.48
	JUMLAH PENDAPATAN	5,251,000	3,858,500	0	3,858,500	73.48

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 005
: 05
: 3000
: 403429
: KD

MAHKAMAH AGUNG
Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
BANGKA BELITUNG
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 29/07/25 3:07 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 29/7/25 2:06 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	180,000	181,000	0	0	0	0	181,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	180,000	181,000	0	0	0	0	181,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,905,000	6,904,000	2,900,000		2,900,000	42	4,004,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	6,905,000	6,904,000	2,900,000	0	2,900,000	42	4,004,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,800,000	28,800,000	12,000,000	0	12,000,000	41.67	16,800,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	29,100,000	29,100,000	12,300,000	0	12,300,000	42.27	16,800,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17,200,000	17,200,000	0	0	0	0	17,200,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	17,200,000	17,200,000	0	0	0	0	17,200,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	53,385,000	53,385,000	15,200,000	0	15,200,000	28.47	38,185,000
	JUMLAH BELANJA	53,385,000	53,385,000	15,200,000	0	15,200,000	28.47	38,185,000

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (05) Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN)
WILAYAH/PROVINSI : (3000) BANGKA BELITUNG
SATUAN KERJA : (403429) PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL
PINANG

Tgl Data : 29/07/25 12:28 PM
Tgl Cetak : 29/07/25 3:06 PM
Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,573,123	1,448,500	6,124,623	422.83
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,901,500)	(12,540,500)	(7,361,000)	58.7
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,491,500	12,386,500	105,000	0.85
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(7,410,000)	(154,000)	(7,256,000)	4,711.69
EKUITAS AKHIR	163,123	1,294,500	(1,131,377)	(87.4)

Keterangan :
FINAL

Pangkalpinang, 29 Juli 2025
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

DORA NATALIA SINGARIMBUN
NIP 198112292006042015